



**TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DALAM BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KABUPATEN GROBOGAN**

Yoga Indra Kemala*, Amiek Soemarmi, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : yogakemala@gmail.com

Abstrak

Di Negara Indonesia ini masih banyak rakyat yang mengalami disabilitas ekonomi yang berkepanjangan atau bisa kita sebut sebagai fakir miskin. Sebagai dinas yang mengemban tugas dalam bidang sosial dan tenaga kerja yang diharapkan dapat mengurangi jumlah fakir miskin, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan banyak menemui hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam menangani dan menekan jumlah fakir miskin di Kabupaten Grobogan dan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Fakir Miskin, Kabupaten Grobogan.

Abstract

In the country of Indonesia is still a lot of people who experience prolonged economic disability or can we refer to as the poor. As the service task in the field of social and labor is expected to reduce the number of poor, Social Service, manpower and transmigration Grobogan encountered many obstacles. This research aims to know the duties and functions of the Department of social, labor and Transmigration Grobogan in handle and pressing the number of the poor in Grobogan and barriers that exist in the implementation as well as the efforts made to resolve it.

Keywords: tasks and functions of the Department of social, labor and Transmigration, Poor, Grobogan.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu Negara di dunia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun kehidupan masyarakatnya sampai saat ini masih dalam kondisi terpuruk. Meskipun perjuangan bangsa Indonesia sejak awal pendiriannya bertujuan untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke kelima, Pancasila).

Namun pada kenyataannya di Negara Indonesia ini masih banyak rakyat yang mengalami disabilitas ekonomi yang berkepanjangan atau bisa kita sebut sebagai fakir miskin. Fakir miskin tersebut menyebar tidak hanya di kota-kota besar saja, namun juga mendarat di berbagai daerah kabupaten yang tergolong sedang berusaha untuk menjadi daerah yang lebih maju. Contohnya seperti di Kabupaten Grobogan yang dipandang oleh pemerintah Provinsi sebagai daerah Kabupaten yang sedang merangkak maju. Menurut pihak dinas yang menangani fakir miskin di Kabupaten Grobogan, wilayah tersebut bukan mengalami penurunan yang drastis namun sering kali mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Padahal seharusnya pemerintah menekan jumlah fakir miskin yang ada di setiap daerah untuk mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan sosial.

Kabupaten Grobogan yang kental dengan budaya Jawa-nya seperti menjaga perasaan dan sebagainya, memberikan suasana lain pada pengertian hukum, budaya hukum, dan prosedur hukum. Maka

dalam hal ini struktur sosial menjadi faktor penentu dalam hukum dan masyarakat.¹ Struktur sosial yang dimaksud adalah perangkat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta sikap maupun pola hubungan di antara anggota masyarakat.² Dengan perkembangan zaman yang terus maju dan menjadi modern dan dengan fenomena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin meningkat dan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dapat meningkatkan pula jumlah tingkat kemiskinan.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita Negara yang luhur cita-cita tersebut, yaitu membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara memuat hal-hal pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kategori umum. Artinya pengaturan hal-hal yang disepakati para *founding father* sebagai suatu urgent dan vital untuk

¹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 3.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 12.

³ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 4.

diatasi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara menempatkan permasalahan sosial menjadi bagian hal pokok kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"⁴, dan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"⁵. Dua ketentuan pasal ini dalam penjelasan disebutkan secara jelas bahwa negara bertanggungjawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam hal ini hukum dapat dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mengadakan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan. Kesejahteraan sosial, yang ingin diwujudkan dalam negara Republik Indonesia, telah pula diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini mewujudkan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah dipergunakan bagiterwujudnya kemakmuran rakyat.

Adapun di dalam UDD 1945 pasal 34 dikatakan sebagai berikut "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara" yang artinya

adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Maka konsekuensinya negara atau pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Mengingat bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hukum diharapkan mampu memfungsikan dirinya untuk mengatasi atau bahkan memberantas kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian masyarakat kita.

Upaya mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia perihal mensejahterakan masyarakat, maka dibentuklah suatu Dinas yang mengayomi, memperhatikan, dan menangani fakir miskin yaitu Dinas Sosial. Keberadaan fakir miskin di daerah Grobogan juga patut diperhatikan oleh Dinas Pemerintah Grobogan yang memiliki nama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan keadaan yang demikian, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : "TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN GROBOGAN".

A. Perumusan Masalah

⁴Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam deskripsi tentang latar belakang penelitian diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi obyek pembahasan dalam skripsi penulis, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan di Kabupaten Grobogan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin di Kabupaten Grobogan ?

B. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian yang dilakukan sudah barang tentu mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan solusi bagi permasalahan tersebut.

b. Memberikan pengetahuan mengenai lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk bidang penanganan fakir miskin di suatu daerah.

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga-lembaga bidang penanganan fakir miskin di suatu daerah.

d. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk lebih peduli terhadap bidang penanganan fakir miskin di suatu daerah, karena merupakan permasalahan yang menyinggung kejiwaan sosial dari masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat serta untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam ilmu hukum tata Negara yang menyinggung permasalahan sosial kemasyarakatan mengenai tugas dan fungsi dari dinas social, tenaga kerja dan transmigrasi dalam bidang penanganan fakir miskin di Kabupaten Grobogan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya umum (skripsi) Program Sarjana (S-I) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu

dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- Latar Belakang masalah
- Permasalahan
- Tujuan Penelitian
- Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas pada Bab IV. Dalam bab ini diuraikan mengenai Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, pengertian fakir miskin, dan penanganan fakir miskin di wilayah Kabupaten Grobogan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu metode penelitian Yuridis Normatif, yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini data hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang dituangkan dalam Bab II sehingga tampak jelas bagaimana hasil penelitian itu, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan. Pada bab ini diuraikan mengenai kedudukan, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dan cara mengatasinya.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisikan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya dan tersusun atas kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan yaitu menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian yang merupakan hasil akhir dan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Disamping itu juga disertakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang mungkin dapat bermanfaat. Selain itu untuk mengetahui referensi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi literatur-literatur dan lampiran-lampiran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung kesempurnaan data.

II. METODE

Penelitian adalah suatu usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Dapat pula penelitian merupakan suatu penyaluran hasrat ingin tahu manusia, hasrat ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan

penelitian. Jadi mengadakan suatu penelitian adalah mempertanyakan suatu hal untuk mendapatkan sesuatu hal untuk mendapatkan jawaban.⁶

Tujuan penelitian pada umumnya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tanpa teori yang jelas dan benar seorang peneliti akan keliru dalam memilih alat analisis, melihat hubungan sebab akibat serta dalam mengumpulkan data. Kemudian menentukan variable-variable yang akan diteliti sangat tergantung pada daya khayal dari peneliti dan ditentukan oleh daya kemampuan menguasai teori-teori yang terkait.

Menurut Kartini Kartono, Ia mengemukakan bahwa metode penelitian adalah “cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian ilmiah melibatkan lebih dari sekedar pengembangan kecakapan-kecakapan teknis, tetapi memiliki suatu sasaran yang lebih jauh yaitu

menghadirkan prosedur-prosedur didalam suatu konteks yang memungkinkan penulis memilih strategi penelitian yang layak.⁸

Yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala hukum yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran-penalaran, dalil-dalil serta postulat-postulat yang menjadi latar belakang dan setiap langkah dalam suatu proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif serta membandingkan suatu unsur-unsur penting dalam suatu kerangka penelitian hukum tersebut.⁹

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat menghasilkan kesimpulan dengan melalui prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan. Hasil penelitian itu tergantung pada pengalaman dan ketrampilan penelitian, tersedianya dana serta lamanya waktu penelitian.

⁶ M.Sarwoko, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta:BPFE, 1987), hlm. 1.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 15

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung), 1976.hlm.15.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1987, hlm. 43.

Jadi dalam penelitian agar tujuan yang diinginkan berhasil dengan baik, sangat diperlukan adanya metode. Adapun metode itu sendiri dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, kemudian umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang dipergunakan harus relevan dengan masalah yang dirumuskan.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, metode pengumpulan data berupa data empiris (pengalaman) serta wawancara para pihak terkait yang artinya dapat berapa kali diuji dengan hasil yang sama. Metode analisis data yang menggunakan metode kualitatif.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

¹⁰Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajahmada Universitas Press, 1983), hlm. 61.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu tugas dan fungsi dinas sosial terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ini di dasarkan pada kaidah-kaidah hukum norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya yang berlaku mengenai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif¹² yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini digunakan untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban negara yang berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Data

¹¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 13-14.

¹²Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 12.

yang menjadi obyek penelitian dianalisa apakah peraturan perundang-undangan tersebut pelaksanaannya sudah sesuai atau belum yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber pendukung penelitian saja, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang proses pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :¹³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang digunakan oleh Penulis yaitu Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.

i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

- a. Buku-buku/literatur
- b. Pendapat pakar dari dan majalah
- c. Hasil-hasil Penelitian
- d. Hasil karya ilmiah
- e. Artikel dari internet
- f. Kamus
- g. Ensiklopedia dan sejenisnya.

E. Metode Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah data sekunder saja, yaitu studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum,

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit hlm. 13.

dan pendapat sarjana hukum.¹⁴Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dimana data dijelaskan secara deskriptif analisis. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

F. Metode Penyajian Data

Setelah menemukan data primer dan data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, teratur dan terperinci.

Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing, sedangkan data-data yang tidak sesuai dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang sudah tersaji dalam bentuk yang sistematis tersebut kemudian disusun dalam laporan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Dalam Bidang

Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Grobogan

- a. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan
1. Letak Geografis

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7°LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, wilayah ini sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.¹⁵

Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km. Jarak Ibukota Kabupaten Grobogan ke beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

- Purwodadi ke Semarang : ± 64 Km

¹⁴Riyanto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004)

¹⁵<http://grobogan.go.id/profil/kondisi-geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada tanggal 3 Februari 2016, pukul 12.32 WIB

- Purwodadi ke Demak : ± 39 Km
- Purwodadi ke Kudus : ± 45 Km
- Purwodadi ke Pati : ± 45 Km
- Purwodadi ke Blora : ± 64 Km
- Purwodadi ke Sragen : ± 64 Km
- Purwodadi ke Surakarta : ± 64 Km

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km² (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km² (2,2%). Secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana tabel berikut:

2. Topografi

Kabupaten Grobogan memiliki topografi daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya yang dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

- Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan antara 0° - 8° meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah Selatan dan Wirosari sebelah Selatan.
- Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15° meliputi wilayah Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan

sebelah Utara dan Wirosari sebelah Utara.

- Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15° meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah Selatan wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Kependudukan

1. Jumlah

Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebanyak 1.368.307 jiwa terdiri dari 676.732 jiwa laki-laki dan 691.575 jiwa perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Purwodadi yaitu sebanyak 121,740 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Klambu yaitu sebanyak 33.826 jiwa.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebagian besar adalah tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 1.238.052 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah tamat Perguruan Tinggi (PT) yaitu sebanyak 18.940 jiwa.

3.

Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebagian besar bekerja atau sebagai tenaga kerja di sektor Pertanian Tanaman Pangan yaitu sebanyak 405.425 jiwa, sedangkan yang terkecil bekerja di sektor Perikanan yaitu sebanyak 451 jiwa.

b. Rencana Strategik Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan**1. Visi**

Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah :

" Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Grobogan"

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan kesejahteraan social oleh perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk masyarakat Kabupaten Grobogan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mempunyai misi - misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kerja.
- c. Melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui penempatan dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
- e. Meningkatkan motivasi dan fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.
- b. Mengurangi jumlah pengangguran terbuka.
- c. Mengoptimalkan program AKAL, AKAD, AKAN.
- d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam upaya mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha.
- e. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan adalah :

- a. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Tersalurkannya para pencari kerja.
- c. Meningkatnya ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja.
- d. Terbina dan terlindunginya tenaga kerja.
- e. Terbina dan berkembangnya program transmigrasi.

5. Strategi

Strategi organisasi merupakan suatu persyaratan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang, mencakup rencana program dan tindakan - tindakan manajemen untuk mencapai misinya. Apabila dikaitkan dengan hasil pemanfaatan factor kunci keberhasilan, maka srategi adalah rencana yang menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan factor kunci keberhasilan internal

organisasi dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai.

6. Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 - 2016 bahwa arah kebijakan fungsi sosial sub fungsi sosial dan fungsi ekonomi sub fungsi tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penyusunan standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Peningkatan ketrampilan pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- c. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- d. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transmigrasi.

7. Program

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- g. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)
- h. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- i. Program Pembinaan Anak Terlantar
- j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- l. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
- m. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- n. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- o. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- p. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- q. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- r. Program Transmigrasi Lokal

c. Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

1. Kedudukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

Pembentukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, kedudukan dan tugas pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan yang menyebutkan :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. *Dinas Pendidikan;*
- b. *Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;*
- c. *Dinas Kesehatan;*
- d. *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;*
- e. *Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;*
- f. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;*
- g. *Dinas Bina Marga;*
- h. *Dinas Pengairan;*
- i. *Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;*
- j. *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;*
- k. *Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;*
- l. *Dinas Peternakan dan Perikanan;*
- m. *Dinas Kehutanan dan Perkebunan;*
- n. *Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan; dan*
- o. *Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.*¹⁶

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 8 Purwodadi. Telepon (0292) 421967.

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan tugas pokok

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, maka susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bab Perencanaan;
 - b. Sub Bab Keuangan;
 - c. Sub Bab Umum.
3. Bidang Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Institusi dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
4. Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Kerja, membawahkan :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produktivitas Kerja.
5. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahkan :
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial.
6. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pelatihan Calon Transmigran;
 - c. Seksi Kerjasama dan Penempatan Calon Transmigran.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁷

¹⁶Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.

¹⁷Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.

Gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai struktur organisasi tersebut diatas, dapat dilihat mengenai tugas dari masing-masing bagian dari susuna organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelolaan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah tangga.

c. Bidang Sosial

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial.

d. Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Kerja

Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Kerja ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi dalam bidang penempatan, perluasan dan produktivitas kerja.

e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial

Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta

mengevaluasi di bidang normakerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

f. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

3. Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

- e. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi.
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas.
- g. Pemberian rekomendasi perijinan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Cara Mengatasi Persoalan – Persoalan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Bidang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Grobogan**
- a. Melaksanakan Program Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin)
- Upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, diperlukan kondisi APBN dan APBD yang sehat dan kredibel. Dengan demikian Pemerintah melakukan kebijakan perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok termiskin dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan pengentasa kemiskinan¹⁸, maka pencapaian sasaran tersebut ditempuh melalui 13 macam program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT (Komunitas Adat Terpencil), dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya
 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 9. Program Pembinaan Anak Terlantar
 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 11. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (WTS, PGOT, Eks NAPI, dan Penyakit Sosial Lainnya)
 12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 13. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah melaksanakan kegiatan pelayanan yang bersifat rutin untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan, diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, pemeliharaan yang bersifat rutin,

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Sartono, SH.MM. selaku sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, tanggal 13 April 2016

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan juga melaksanakan kegiatan diantaranya pembinaan anak jalanan dan anak potensial dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Grobogan; pemberdayaan Tim Advokasi Difabel (Penyandang Cacat) Kabupaten Grobogan; Razia PGOT (Pengemis Gelandangan Orang Tua); pembinaan sosial bagi PSM dan Organisasi sosial; pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi); pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) fakir miskin; pembinaan Tagana (Taruna Siaga Berencana); pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Hasil dari kegiatan - kegiatan tersebut mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kabupaten Grobogan sehingga dapat mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan cara :**
1. Melaksanakan pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 2. Melaksanakan pendataan penyandang cacat berat dan lanjut usia
 3. Melaksanakan pembinaan anak terlantar
 4. Melaksanakan pembinaan panti asuhan / panti jompo
 5. Melaksanakan penjangkaran Pengemis Gelandangan Orang Tua

6. Melaksanakan pemberdayaan Tim Advokasi Difabel (Penyandang Cacat)
 7. Melaksanakan pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) fakir miskin
 8. Melaksanakan pembinaan Tagana (Taruna Siaga Berencana)
 9. Melaksanakan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial
- c. Menyalurkan Para Pencari Kerja

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang cukup luas dan berpenduduk padat dengan luas wilayah 1975,865 Km² atau 197.586.420 Ha. Jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 sebesar 1.413.108 jiwa, terdiri dari 708.124 jiwa penduduk laki - laki dan 704.984 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 715.184 jiwa/Km². Sedangkan jumlah penduduk untuk Tahun 2014 sebesar 1.514.886 jiwa, terdiri dari 752.557 jiwa penduduk laki - laki dan 762.329 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan 766,7 jiwa/Km². Dengan demikian terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 0,93%.¹⁹ Meskipun mengalami penurunan, namun belum mencapai pertumbuhan penduduk 0 (Zero Population Growth). Mengingat jumlah penduduk yang sudah relative besar, maka masalah penduduk merupakan masalah nasional yang perlu penanganan secara serius, terarah, terpadu dan berkesinambungan oleh sernua pihak

¹⁹Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

baik pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk besar pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan di bidang pelayanan. Untuk Kabupaten Grobogan jumlah angkatan kerja sebesar 1.111.657 orang, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sejumlah 814.503 jiwa dan yang belum terserap sebesar 119.330 jiwa. Prediksi pengangguran di Kabupaten Grobogan sebesar 10,7%.²⁰

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan melaksanakan 1 program untuk meningkatkan keserngapan kerja yang diimplermentasikan dalam 10 kegiatan,yaitu :

- a. Penyebarluasan informasi bursa kerja
- b. Pelatihan tukang kayu
- c. Pelatihan menjahit
- d. Pemantauan kinerja lembaga PPTKIS / cabang PPTKIS (Pemantauan Kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
- e. Pelatihan 5 S (Sisih, Susun, Sasap, Susuh, Suluh)
- f. Peningkatan keterampilan usaha mandiri
- g. Pemantauan kinerja BKK (Bursa Kerja Khusus)
- h. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha mandiri
- i. Job Market Fair
- j. Pelatihan membuat makanan ringan

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut agar masyarakat atau pencari kerja mampu untuk membuka peluang usaha mandiri,

serta terkirimkannya TKI sesuai prosedur dan terlindunginya hak – hak TKI.

Selanjutnya untuk penanganan pengangguran, dilaksanakan pelatihan diantaranya pelatihan tukang kayu, pelatihan menjahit, pelatihan membuat makanan ringan, peningkatan ketrampilan usaha mandiri, pemantauan BKK agar masyarakat tidak hanya menggantungkan hidupnya dari bekerja tetapi membuka lapangan kerja sendiri.

- d. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan misi ketiga dari Rencana Stratejik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi para pencari kerja, dengan mencanangkan 1 program yaitu program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang diimplementasikan dalam 7 kegiatan yaitu penyusunan data base ketenagakerjaan, perencanaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pelatihan berbasis kompetensi kejuruan menjahit, komputer dan otomotif sepeda motor, pelatihan berbasis kewirausahaan, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan peningkatan produktifitas di bidang teknisi komputer, monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, serta untuk mendukung agar visi dan misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat tercapai,maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Purwaningsih, SE. selaku kepala sub bagian keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, tanggal 13 April 2016.

melakukan perencanaan secara baik dan benar dengan didukung sumber data lapangan yang baik.

e. **Membina Dan Melindungi Tenaga Kerja**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan melaksanakan program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan sosialisasi dan bimtek K3
2. Kegiatan peningkatan kinerja LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit
3. Kegiatan sosialisasi norma ketenagakerjaan
4. Kegiatan peningkatan kinerja dewan pengupahan
5. Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap K3
6. Kegiatan kampanye bulan K3
7. Kegiatan peningkatan kepesertaan Jamsostek
8. Kegiatan pemeriksaan perusahaan
9. Kegiatan sosialisasi sarana hubungan industrial dan peraturan ketenagakerjaan
10. Kegiatan pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK).²¹

Kegiatan - kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memberikan para pekerja rasa nyaman dan ketenangan dalam bekerja, memberikan perlindungan akan hak - hak dan kesejahteraan pekerja, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja.

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Sartono, SH.MM. selaku sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, tanggal 13 April 2016

f. **Membina Dan Mengembangkan Program Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan salah satu solusi bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang direncanakan, mulai dari proses penyeleksian hingga penempatan, serta berbagai fasilitas yang disediakan bagi para transmigran. Oleh karena itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan memberikan penjelasan yang sebenar - benarnya kepada masyarakat calon transmigran terhadap kondisi daerah tujuan serta ketrampilan dan keahlian yang harus dimiliki oleh para calon transmigran tersebut.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan program transmigrasi adalah adanya transmigran yang kembali ke daerah asal, oleh karena itu perencanaan transmigrasi dirumuskan dengan lebih baik oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, mulai dari pemilihan wilayah tujuan sampai penyiapan ketrampilan dan keahlian sehingga para calon transmigran mampu untuk bekerja dan mengembangkan usahanya.

IV. KESIMPULAN

Dalam uraian pada bab sebelumnya yang membahas tentang hasil penelitian dan analisis data pada skripsi yang berjudul "Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Dalam Bidang

Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Grobogan” ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan telah melakukan tugas dan fungsinya dalam mendukung Otonomi Daerah antara lain dengan menangani masalah Fakir Miskin Di Kabupaten Grobogan, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan melalui pengadaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT (Komunitas Adat Terpencil), dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (WTS, PGOT, Eks NAPI, dan Penyakit Sosial Lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam. Upaya-upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya ditujukan untuk menangani fakir miskin di Kabupaten Grobogan.
2. Cara mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dalam bidang penanganan fakir miskin di Kabupaten Grobogan adalah :
 - a. Melaksanakan Program Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin).
 - b. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
 - c. Menyalurkan para pencari kerja yang ada di Kabupaten Grobogan dengan dilaksanakannya program peningkatan kesernpatan kerja yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan seperti Penyebarluasan informasi bursa kerja, Pelatihan tukang kayu, Pelatihan menjahit, Pemantauan kinerja lembaga PPTKIS / cabang PPTKIS (Pemantauan Kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), Pelatihan 5 S (Sisih, Susun, Sasap, Susuh, Suluh), Peningkatan keterampilan usaha mandiri, Pemantauan kinerja BKK (Bursa Kerja Khusus), Pemberdayaan masyarakat melalui usaha mandiri, Job Market Fair, dan Pelatihan membuat makanan ringan.
 - d. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan melaksanakan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang diimplementasikan dalam 7 kegiatan yaitu penyusunan data base ketenagakerjaan, perencanaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pelatihan berbasis kompetensi kejuruan menjahit, komputer dan otomotif sepeda motor, pelatihan berbasis kewirausahaan, pelatihan berbasis



masyarakat, pelatihan peningkatan produktifitas di bidang teknis komputer, monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan.

- e. Membina dan Melindungi Tenaga Kerja dengan cara mengadakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pekerja rasa nyaman dan ketenangan dalam bekerja, memberikan perlindungan akan hak-hak dan kesejahteraan pekerja, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja.
- f. Membina dan Mengembangkan Program Transmigrasi yang dirumuskan dengan baik, mulai dari pemilihan wilayah tujuan sampai penyiapan ketrampilan dan keahlian agar para calon transmigran mampu untuk bekerja dan mengembangkan usahanya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur (Buku-buku)

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Geman Insani.
- Basil, Blackwell. 1952. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford.
- Gazalba, Sidi. 1985. *Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Hasby Ash-Shiddieqie, Teungku. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Kartini Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- M. Simatupang, Victor dan Sitanggang, Cormentyna. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Manurung. 1993. *Dalam Bulletin YDS*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Mardimin, Yohanes. 1996. *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Masdar F., Mas'udi. 2005. *Menggagas Ulang Zakat*. Bandung: Mizan.
- Nawawi, Hadar. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Riwu Kaho, Yosef. 1985. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.



- Sarwoko. 1987. *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surya Adi Subrata, Winarna. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: UUP. AMP YKPN.
- Suteki.2013. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, Dinas Sosial.2015. *Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan*.Kab.Grobogan : Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pancasila
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Wawancara

- Purwaningsih, SE., Kepala sub bagian keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, tanggal 13 April 2016.
- Stefanus Sartono, SH.MM., Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, tanggal 13 April 2016.

Publikasi Internet

- <http://www.google.com>
- <http://grobogan.go.id>